

ABSTRAK

KAJIAN TINGKAT KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK (Studi Deskriptif Pada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang)

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sumedang, keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangatlah kompleks dan rumit. Terkait dengan masalah PKL ini, pihak yang berwenang menertibkannya yaitu Satpol PP, saat ini seakan-akan tidak berdaya dengan merajalelanya PKL di Kabupaten Sumedang. Razia yang dilakukan Satpol PP ini sepertinya tidak efektif dilakukan, karena pada kenyataannya PKL tersebut seperti tidak kapok dan kembali lagi berdagang di tempat yang seharusnya bersih dari PKL tersebut.

Realita yang ditunjukkan melalui pra penelitian yang saya lakukan, terlihat bahwa rata – rata PKL memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang kurang, faktor lingkungan, dan sebagainya. Terlebih lagi tingkat kesadaran hukum PKL tersebut masih jauh untuk menjadi warga negara yang baik. Perlunya optimalisasi dari pemerintah kabupaten Sumedang terutama Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah tentang K3 tersebut. Penelitian ini didasarkan pada empat rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima lima tentang berbagai kebijakan yang mengatur K3 di Kabupaten Sumedang ?, 2. Bagaimana sikap dan perilaku pedagang kaki lima terhadap peraturan pemerintah mengenai kebijakan K3 di Kabupaten Sumedang ?, 3. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kebijakan K3 khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan warga Negara yang baik ?.

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendekatan kuantitatif, metode deskriptif dengan bentuk penelitian sampling purposif. Data-data diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung.

Dari hasil analisis data penelitian didapatkan bahwa : 1. Pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap Perda K3 di Kabupaten Sumedang sangatlah rendah. 2. Sikap dan perilaku PKL terhadap keberadaan Perda K3 cukup baik karena sebenarnya mereka menerima keberadaan Perda K3 asalkan tidak merugikan mereka. 3. Kinerja Satpol PP secara keseluruhan sudah cukup baik. Tetapi ada pula satu hal pokok yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Satpol PP yaitu mengenai peran sertanya dalam melakukan sosialisasi Perda K3 kepada PKL.

Solusi yang bisa penulis ajukan harus melakukan revisi dan sosialisasi yang intensif mengenai Perda K3 di Kabupaten Sumedang yang berlaku saat ini karena Perda K3 tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga menyediakan tempat relokasi untuk PKL di Alun – Alun Sumedang.

ABSTRACT

A STUDY OF STREET VENDORS' AWARENESS TOWARDS A LAW IN BEING GOOD CITIZENS (Descriptive Study of Street Vendors in Sumedang)

Problems of street vendors (PKL) is a classic problem that always happens in every area. Especially in Sumedang, on the one hand their existence is one of the engines in economy, but on the other hand it becomes complicated problems. Satpol PP as an official who has authority to discipline the street vendors gives up, because so many street vendors who break the rules. Raids the street vendors it is not the effective way, because in fact they will always come back and do their business in the place which is forbidden for them.

My pre-research shows that the average of street vendors (PKL) is in low level of law awareness. It happens because of some factors such as educational factor, environmental factor, etc.

The optimization from the government of Sumedang and satpol PP is necessary to solve the problem of the street vendors. This research is based on four statement of problems, there are 1. How are the knowledge and understanding of the street vendors about the various policies that govern K3 in Sumedang?, 2. How is the behavior of street vendors to government regulations, regarding the K3 principle in Sumedang?, 3. How does the performance of the Civil Service Police (Satuan Polisi Pramong Praja) K3 enforce policies particularly in disciplining the street vendors in Sumedang to become good citizens?

The approach used to uncover these issues is a quantitative approach, the descriptive method of research form purposive sampling. The data obtained through structured interviews, observation, documentation studies, literature studies and interviews as supporting data.

From the analysis of the study data showed that: 1. The knowledge and understanding of the street vendors of Perda K3 in Sumedang K3 are very low. 2. Attitudes and their behavior of the steert vendors to the existance of K3 have actually been good because they accept the existence of K3 as long as they do not damage them. 3. Performance of Satpol PP over all is good enough, but there is one thing that has been ignored by them it is their participation in socializing regulation of K3 to the street venors.

Authors proposed a solution that may have to do a revision and intensive socialization of the law of K3 in Sumedang currently, because the law is outdated and does not conform with the times and also provides a place for the relocation of street vendors in Alun - Alun Sumedang.